

TRANSFORMASI MAKROEKONOMI INDONESIA: DARI ORDE BARU MENUJU STABILISASI REFORMASI (1998–2004).

Daffa Anselmo¹, Eni Puji Estut², Syaisar Fadhlil³

STIE Semarang

enipuji001@gmail.com

Abstract. The 1997–1998 Asian Financial Crisis exposed structural weaknesses in Indonesia's New Order state-capitalist economy, including dependence on external debt, weak financial regulation, and pervasive rent-seeking. This study analyzes Indonesia's macroeconomic transformation during the early Reformasi period (1999–2004), focusing on post-crisis stabilization policies and institutional change. Using a qualitative historical- descriptive approach supported by data from BPS, Bank Indonesia, and relevant literature, the findings show that tight monetary policy, banking restructuring, Bank Indonesia's independence, and IMF-supported reforms reduced inflation and restored economic growth to 5.13 percent in 2004, despite continued volatility in 2001–2002. The amendment of Article 33 of the 1945 Constitution reflects a shift toward a mixed economic system combining market efficiency and social justice. Overall, early Reformasi achieved macroeconomic stabilization, while structural challenges such as inequality and oligarchic dominance persisted.

Keyword: *state capitalism; macroeconomic stabilization; banking reform; economic constitution; Reformasi*

Abstraksi. Krisis Finansial Asia 1997–1998 mengungkap kelemahan struktural ekonomi Indonesia era Orde Baru yang bercorak kapitalisme negara, seperti ketergantungan pada utang luar negeri, lemahnya regulasi keuangan, dan praktik rente yang meluas. Penelitian ini menganalisis transformasi makroekonomi Indonesia pada masa awal Reformasi (1999–2004) dengan fokus pada kebijakan stabilisasi pascakrisis dan perubahan kelembagaan. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-historis yang didukung data BPS, Bank Indonesia, dan literatur relevan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan moneter ketat, restrukturisasi perbankan, penguatan independensi Bank Indonesia, serta reformasi dalam kerangka IMF berhasil menekan inflasi dan memulihkan pertumbuhan ekonomi hingga 5,13 persen pada 2004, meskipun volatilitas masih terjadi pada 2001–2002. Amandemen Pasal 33 UUD 1945 mencerminkan pergeseran menuju sistem ekonomi campuran yang mengintegrasikan efisiensi pasar dan keadilan sosial. Secara umum, Reformasi awal berhasil mencapai stabilisasi makroekonomi, namun persoalan struktural seperti ketimpangan dan dominasi oligarki tetap berlanjut.

Kata kunci: *kapitalisme negara; stabilisasi makroekonomi; reformasi perbankan; konstitusi ekonomi; Reformasi*

PENDAHULUAN

Trajektori ekonomi Indonesia dari pertengahan abad ke-20 merupakan narasi yang sarat dengan dialektika antara pertumbuhan yang impresif dan kerentanan institusional yang tersembunyi. Pemerintahan Orde Baru (Orba, 1966–1998), yang dipimpin oleh teknokrat berorientasi pasar sering disebut sebagai "Berkeley Mafia" berhasil mereintegrasi Indonesia ke dalam sistem ekonomi global, bergabung kembali dengan Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Misi utama pada periode awal adalah stabilisasi makroekonomi, yang berhasil meredam hiperinflasi yang sempat mencapai 650% pada tahun 1965 menjadi di bawah 15% dalam dua tahun. Kebijakan fundamental seperti Kebijakan Uang Ketat (*tight money policy*), disiplin fiskal, dan penerapan Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) menjadi pilar utama.

Model pembangunan Orde Baru, yang menekankan stabilitas politik dan pertumbuhan, memang menghasilkan capaian agregat yang luar biasa. Indonesia bertransformasi menjadi salah satu High- Performing Asian Economies (HPAEs), mencatatkan pertumbuhan PDB tahunan rata-rata di atas 7% dari tahun 1970-an hingga pertengahan 1990-an. Keberhasilan ini berdampak signifikan pada kesejahteraan sosial, di mana angka kemiskinan absolut turun drastis dari sekitar 40% pada tahun 1976 menjadi hanya 11% pada tahun 1996.

Namun, fondasi keberhasilan ini rapuh secara struktural. Pertumbuhan didominasi oleh ekonomi campuran yang terlalu bergantung pada pendapatan ekspor minyak—khususnya pada era *oil boom* 1970-an—serta pinjaman luar negeri yang besar. Ketergantungan ini menutupi kelemahan institusional yang parah, ditandai dengan meluasnya praktik Korupsi,

Kolusi, dan Nepotisme (KKN), yang menggerogoti disiplin fiskal melalui pengeluaran *off-budget* (di luar anggaran) dan mendistorsi alokasi sumber daya demi kepentingan kroni.

Titik balik kritis terjadi ketika pendapatan migas menurun tajam di awal 1980-an. Pemerintah merespons dengan serangkaian deregulasi finansial, yang paling signifikan adalah Paket Oktober 1988 (Pakto 88), yang bertujuan memobilisasi sumber daya domestik dan mendorong sektor swasta. Namun, deregulasi yang cepat ini dilakukan tanpa diimbangi penguatan kerangka regulasi dan pengawasan perbankan yang memadai, sebuah *sequencing error* fatal. Akibatnya, sistem perbankan nasional (*private national banks*) mengalami ekspansi liar dan menumpuk utang luar negeri swasta jangka pendek yang tidak dilindungi nilai (*unhedged*), menciptakan kerentanan sistemik yang eksplosif terhadap guncangan nilai tukar.

Krisis Finansial Asia pada tahun 1997 menjadikatalis yang menghancurkan, mengubah krisis moneter (*KrisMon*) menjadi risis ekonomi dan politik total (*KrisTal*). Nilai tukar rupiah anjlok tajam (*overshooting*), kepercayaan pasar runtuh, dan ekonomi terkontraksi hingga minus 13,1% pa tahun 1998, diikuti hiperinflasi yang mencapai puncaknya di angka 58,4% (atau sekitar 80% menurut sumber lain). Bencana ekonomi ini memaksa Presiden Soeharto mundur pada Mei 1998, membuka jalan bagi Era Reformasi.

TUJUAN PENELITIAN

Studi kualitatif ini bertujuan untuk menganalisis transformasi arsitektur makroekonomi Indonesia, secara khusus membandingkan model pembangunan sentralistik dan berbasis rent-seeking pada masa Orde Baru dengan upaya stabilisasi dan liberalisasi pasar yang dipaksakan pada era awal Reformasi (1999–2004). Analisis akan berfokus pada dinamika variabel makro utama (pertumbuhan, inflasi, stabilitas finansial) dan efektivitas instrumen kebijakan (moneter, deregulasi sektor riil) dalam upaya transisi dari ekonomi yang didominasi *state capitalism* yang rapuh menuju struktur ekonomi yang lebih terbuka, meskipun masih menghadapi fragmentasi politik dan persoalan pemerataan.

RUMUSAN MASALAH

1. Analisis Komparatif Kerentanan Struktural dan Arsitektur Pertumbuhan Makroekonomi:

Bagaimanakah kerentanan struktural ekonomi Orde Baru yang dicirikan oleh ketergantungan masif pada pendapatan minyak dan utang luar negeri, praktik KKN, serta sequencing error dalam deregulasi finansial yang menciptakan utang swasta luar negeri yang tak terlindungi nilai (unhedged) secara fundamental berbeda dengan arsitektur ekonomi yang dibangun oleh pemerintahan Reformasi periode awal (1999–2004), terutama dalam hal pilar stabilisasi makro, disiplin fiskal, dan kerangka regulasi perbankan pasca-krisis?

2. Evaluasi Efektivitas Instrumen Kebijakan dalam Menanggulangi Krisis (1999–2004)

Sejauh mana efektivitas instrumen kebijakan makroekonomi yang diadopsi pada Era Reformasi (1999–2004) termasuk pemberian status independen kepada Bank Indonesia (BI), penerapan kebijakan moneter ketat (seperti menaikkan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia/SBI), dan langkah restrukturisasi sektor finansial (likuidasi perbankan dan restrukturisasi utang korporasi) dalam mengembalikan stabilitas makro, yang diukur melalui pemulihan laju pertumbuhan PDB positif, menekan hiperinflasi yang terjadi, dan menstabilkan nilai tukar Rupiah dari titik terendahnya, dibandingkan dengan capaian ekonomi Orde Baru?.

METODE PENELITIAN

Sebuah telaah mendalam mengenai transformasi struktural ekonomi nasional—khususnya dinamika transisi yang kompleks antara Orde Baru dan Era Reformasi (1999–2004)—memerlukan arsenal metodologi yang mampu menguji narasi historis dan kerangka makroekonomi secara kritis. Oleh karena itu, penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif-historis (metode sejarah) yang didukung oleh analisis deskriptif-kritis terhadap literatur primer dan sekunder.

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Analisis terhadap berbagai strategi pemerintah dalam rentang waktu 1999 hingga 2004 untuk mengatasi krisis ekonomi dijalankan dengan menggunakan metode historis. Metode historis merupakan suatu proses untuk menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lalu berdasarkan data yang diperoleh. Pendekatan ini esensial untuk meninjau secara kronologis kondisi Indonesia pada periode krusial tersebut dari perspektif makro ekonomi, termasuk tingkat inflasi, laju pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran.

Sejalan dengan itu, digunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengeksplorasi dan menganalisis perkembangan sistem ekonomi dan implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat. Tujuannya adalah memberikan pemahaman mendalam mengenai dinamika sistem dan kebijakan yang memengaruhi integrasi ekonomi.

Sementara itu, untuk mengkaji pergeseran haluan konstitusi ekonomi, digunakan penelitian normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan perbandingan hukum (komparatif). Pendekatan ini berfokus pada penelaahan pasal-pasal dalam konstitusi yang secara langsung maupun tidak langsung mengatur tentang ekonomi suatu negara, khususnya Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebelum dan sesudah amandemen Reformasi.

Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian dikumpulkan melalui studi pustaka secara komprehensif, mencakup literatur, jurnal, artikel, dan buku-buku yang relevan, serta analisis dokumen resmi negara. Sumber data diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Sumber Primer

Mencakup data terkait indikator ekonomi makro Indonesia seperti tingkat inflasi, laju pertumbuhan PDB, dan pengangguran yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS).

2. Sumber Sekunder

Meliputi buku dan artikel yang membahas krisis dan kondisi ekonomi Indonesia pada rentang tahun 1999– 2004, serta dokumen resmi seperti kebijakan pemerintah dan laporan lembaga ekonomi.

Dalam kerangka metode historis, pengumpulan data diawali dengan tahap heuristik (penelusuran sumber), diikuti oleh kritik sumber (verifikasi) untuk menemukan data yang valid.

Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan kombinasi teknik untuk mencapai tujuan penelitian:

1. Analisis Deskriptif dan Interpretasi

Digunakan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi ekonomi Indonesia pasca krisis (1999–2004). Analisis ini memetakan dinamika kenaikan dan penurunan tingkat inflasi tahunan (misalnya, mencapai 12,55% pada 2001), laju pertumbuhan ekonomi (meningkat dari 0,8% pada 1999 menjadi 5,13% pada 2004), dan strategi-strategi yang diterapkan pemerintah, seperti Kebijakan Moneter, likuidasi perbankan, dan restrukturisasi keuangan.

2. Analisis Konten dan Komparatif

Digunakan untuk menguji implikasi amandemen UUD 1945. Analisis ini membandingkan konstitusi ekonomi pra-Reformasi yang cenderung sosialis (heavy to government) dengan konstitusi pasca-Reformasi yang menunjukkan kecenderungan baru, yaitu pencampuran antara sosialis dan liberalis, dengan diakuinya prinsip "efisiensi berkeadilan".

3. Analisis Naratif

Dipakai untuk menyajikan data dan interpretasi tersebut dalam bentuk historiografi yang komprehensif dan terstruktur.

KAJIAN PUSTAKA

Analisis makroekonomi terhadap transisi Indonesia dari rezim Orde Baru (Orba) ke Era Reformasi mengungkapkan sebuah dialektika kompleks antara pertumbuhan yang didorong negara dan keruntuhan sistemik yang dipicu oleh kegagalan institusional dan kebijakan finansial yang terburu-buru. Periode ini tidak hanya menandai perubahan politik yang dramatis, tetapi juga pergeseran mendasar dalam arsitektur ekonomi nasional, bergerak dari state capitalism yang otokratis menuju model pasar bebas yang terfragmentasi.

1. Arsitektur Ekonomi Orde Baru: Kesuksesan Agregat dan Kerentanan Struktural

Pemerintahan Orde Baru (1966–1998), yang dipimpin oleh Presiden Soeharto dan didukung oleh teknokrat yang dilatih di AS (dikenal sebagai "Mafia Berkeley"), berhasil mengakhiri kekacauan ekonomi Orde Lama, terutama dengan meredam hiperinflasi yang mencapai 650% pada tahun 1965 menjadi di bawah 15% dalam waktu dua tahun. Strategi awal difokuskan pada stabilisasi, disiplin fiskal (seperti prinsip anggaran berimbang), dan reintegrasi Indonesia ke dalam sistem ekonomi global (melalui IMF, Bank Dunia, dan pembentukan IGGI/CGI).

Model pembangunan yang terencana secara sistematis melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) ini menghasilkan pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan, rata-rata di atas 7% per tahun dari tahun 1970-an hingga pertengahan 1990-an. Secara sosial, prestasi yang paling menonjol adalah pengurangan kemiskinan absolut yang drastis, dari sekitar 40% populasi pada tahun 1976 menjadi hanya

11% pada tahun 1996.

Namun, kesuksesan ini ditopang oleh fondasi yang rapuh. Arsitektur ekonomi Orde Baru sangat bergantung pada pendapatan ekspor minyak dan gas (migas), yang pada puncaknya tahun 1980 mencapai 80% dari total ekspor. Ketergantungan ini menunda implementasi reformasi kelembagaan yang sulit dan menciptakan lahan subur bagi praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang meluas. KKN ini menyebabkan distorsi pasar, erosi disiplin fiskal melalui off-budget expenditures, dan alokasi sumber daya yang tidak efisien yang menguntungkan kroni-kroni politik. Skala KKN pada era Soeharto diestimasi mencapai antara \$15 miliar hingga \$35 miliar.

Kebijakan Deregulasi Finansial dan Sequencing Error

Menjelang berakhirnya oil boom pada awal 1980-an, Indonesia menghadapi krisis fiskal dan neraca pembayaran, yang memaksa pemerintah melakukan diversifikasi ekonomi menuju pertumbuhan berbasis ekspor non-migas. Respon kebijakan ini melibatkan liberalisasi sektor finansial, terutama melalui Paket Oktober 1988 (Pakto 88), yang bertujuan untuk mobilisasi dana domestik dan meningkatkan kedalaman finansial (financial deepening). Kebijakan ini menghapus batasan pendirian bank swasta baru dan melonggarkan operasi perbankan. Inilah yang menjadi fatal flaw (cacat fatal) dalam kebijakan makro Orba. Deregulasi perbankan yang cepat ini dilakukan tanpa didukung oleh penguatan kerangka regulasi dan pengawasan yang memadai (sequencing error). Kekosongan pengawasan ini memicu moral hazard di kalangan bank-bank swasta yang baru didirikan, yang kemudian dengan ceroboh mengakumulasi utang luar negeri swasta jangka pendek yang masif dan tidak dilindungi nilai (unhedged). Utang swasta ini menjadi bom waktu sistemik, menggantikan risiko utang publik dengan kerentanan utang swasta yang tak terkontrol.

Ketika Krisis Finansial Asia melanda pada

pertengahan 1997, kerentanan tersembunyi ini tereksplosi. Nilai tukar Rupiah mengalami depresiasi tajam (overshooting), memicu krisis solvabilitas karena utang dalam dolar AS yang tak terbayarkan. Pada tahun 1998, Indonesia menghadapi kontraksi PDB sebesar minus 13,1% dan inflasi melonjak hingga 77% (tahunan). Krisis ini menjadi katalisator yang tak terhindarkan bagi keruntuhan politik rezim Soeharto.

3. Stabilisasi Makroekonomi dan Reformasi Struktural Era Reformasi (1999–2004)

Pemerintahan transisi dan Reformasi (1998–2004) dihadapkan pada tugas mendesak untuk menstabilkan kondisi makroekonomi yang lumpuh. Strategi yang dijalankan didominasi oleh persyaratan program bantuan IMF, yang berfokus pada stabilisasi moneter dan restrukturisasi finansial.

A. Strategi Kebijakan Kunci

Kebijakan Moneter yang Ketat dan Independen: Pemerintah melaksanakan Kebijakan Moneter yang ketat (tight money policy) untuk mengendalikan jumlah uang beredar dan menaikkan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI), yang puncaknya pada kuartal ketiga 1998 mencapai 70,44%. Langkah krusial lainnya adalah pemberian status independen kepada Bank Indonesia (BI) melalui UU No. 23 Tahun 1999, yang bertujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai tukar Rupiah dan sasaran laju inflasi.

B. Capaian Makroekonomi Awal Reformasi:

Strategi ini membawa hasil dalam jangka pendek:

- **Inflasi:** Tingkat inflasi berhasil ditekan dari 77% pada tahun 1998 menjadi 2,01% pada tahun 1999. Meskipun sempat naik kembali pada 2001 (12,55%) dan 2002 (10,03%), tingkat inflasi kembali stabil pada 2003 (5,06%) dan 2004 (6,40%).

• **Pertumbuhan:** Laju pertumbuhan ekonomi pulih dari -13,1% (1998) menjadi positif 0,8% (1999) dan terus meningkat hingga mencapai 5,13% pada tahun 2004.

• **Stabilitas Institusional:** Pemberian status independen pada BI dan penataan ulang Kementerian Keuangan (melalui UU No 17 tentang Keuangan Negara) membantu menciptakan disiplin fiskal dan stabilitas makroekonomi yang lebih terlembaga.

4. Pergeseran Konstitusional dan Paradigma Ekonomi

Transisi ini juga diiringi oleh pergeseran ideologis yang signifikan dalam konstitusi ekonomi Indonesia. UUD 1945 sebelum amandemen cenderung mengiblat ke sistem sosialis (heavy to government), berlandaskan asas kekeluargaan dan penguasaan negara atas cabang-cabang produksi vital (Pasal 33 ayat 1-3).

Era Reformasi membawa perubahan fundamental pada Pasal 33 UUD 1945 dengan penambahan Ayat 4: "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan.

Penambahan frasa "efisiensi berkeadilan" merupakan titik kompromi ideologis yang krusial. Prinsip efisiensi ini, yang merupakan ciri khas ekonomi liberalis, diakui dan dimasukkan ke dalam sistem perekonomian nasional. Perubahan ini secara substansial menggeser kecenderungan ekonomi Indonesia dari sosialis murni menjadi campuran antara sosialis dan liberalis. Ini membuka peluang yang lebih besar bagi praktik-praktik liberal dan neoliberal, seperti privatisasi BUMN, meskipun harus diimbangi dengan prinsip keadilan.

5. Paradoks Liberalisasi dan Oligarki

Meskipun Era Reformasi berhasil dalam

stabilisasi makro pasca-krisis, dari perspektif politik kiri, model pemulihan ini mengandung kontradiksi mendasar.

Narasi kritis menegaskan bahwa kegagalan ekonomi Orde Baru bukanlah kegagalan konsep, melainkan penyimpangan dalam praktik, di mana pertumbuhan dimonopoli oleh kelompok kecil pemegang modal dan rente. Pertumbuhan Orde Baru, meskipun spektakuler, dicapai dengan mengorbankan pemerataan regional dan kualitas kelembagaan.

Transisi ke Reformasi, yang didikte oleh program IMF, sejatinya merupakan agenda neoliberalisme yang memprioritaskan efisiensi pasar, deregulasi, dan peran negara yang minimal. Liberalisasi pasar yang cepat pasca-1998, bukannya menciptakan demokrasi ekonomi sejati (di mana rakyat adalah pelaku utama), malah secara ironis memperkuat oligarki yang sama yang telah mapan selama Orde Baru.

Kelompok kepentingan yang kaya raya melalui praktik KKN Orde Baru tidak hancur oleh krisis, melainkan beradaptasi dengan kerangka politik yang baru. Penekanan baru pada "efisiensi" dalam Pasal 33 UUD 1945 menjadi legalitas bagi market fundamentalism (pasar bebas) yang mengancam prinsip "keadilan". Efisiensi, dalam konteks persaingan yang tidak seimbang di Indonesia, seringkali harus mengorbankan keadilan, seperti yang terlihat dalam kasus penetapan harga BBM yang idealnya harus sama di seluruh Indonesia demi keadilan, meskipun biaya transportasi ke Papua jauh lebih tinggi (prinsip efisiensi).

Akibatnya, meskipun stabilitas moneter tercapai berkat BI yang independen, Indonesia masih gagal dalam mewujudkan kesejahteraan merata: proporsi sektor informal masih besar, pengangguran total masih tinggi, dan ketimpangan pendapatan serta antar-wilayah tetap menjadi masalah struktural.

KESIMPULAN

Transformasi arsitektur makroekonomi Indonesia, bergerak dari cengkeraman otoritarian Orde Baru menuju era stabilisasi pasca-krisis pada permulaan Reformasi (1999– 2004), merupakan sebuah narasi penting yang menegaskan bahwa pembangunan ekonomi, betapapun impresifnya secara agregat, tidak akan berkelanjutan tanpa integritas kelembagaan dan kerangka regulasi yang kuat.

Akar Keruntuhan Struktural Orde Baru

Kajian ini menyimpulkan bahwa keajaiban ekonomi Orde Baru yang mencatatkan pertumbuhan PDB rata-rata di atas 7% per tahun hingga pertengahan 1990-an dan penurunan drastis kemiskinan (dari 40% pada tahun 1976 menjadi 11% pada tahun 1996), dibangun di atas fondasi yang rapuh dan korosif. Fondasi ini bergantung secara kritis pada pendapatan migas yang melimpah dan utang luar negeri, yang memungkinkan rezim untuk menunda reformasi kelembagaan yang sulit.

Kegagalan fatal Orde Baru terletak pada kesalahan pengurutan kebijakan (sequencing error). Deregulasi finansial yang dilakukan secara terburu-buru melalui kebijakan seperti Pakto 88, yang bertujuan memobilisasi dana domestik setelah pendapatan migas menurun, tidak diimbangi dengan penguatan pengawasan perbankan yang memadai. Hal ini memicu akumulasi utang luar negeri swasta jangka pendek yang tidak terlindungi nilai (unhedged) dalam jumlah masif. Akibatnya, ketika Rupiah mengalami overshooting pada tahun 1997 akibat krisis kepercayaan dan spekulasi, kerentanan sistemik ini meledak, menyebabkan kontraksi ekonomi sebesar minus 13,1% pada tahun 1998.

Ini membuktikan bahwa sistem state capitalism Orde Baru adalah sebuah model predatory state yang merusak disiplin fiskal dan

alokasi sumber daya melalui praktik KKN senilai puluhan miliar dolar, sehingga mempersiapkan keruntuhan finansial yang tak terhindarkan.

Akselerasi Stabilisasi Moneter dan Pergeseran Paradigma

Tahun-tahun 1999 hingga 2004 adalah periode darurat yang didorong oleh mandat eksternal (IMF) dan tekanan domestik untuk membangun stabilitas makroekonomi dari reruntuhan. Strategi pemulihan pada era Reformasi secara tegas beralih dari model intervensi Orde Baru ke kerangka pasar yang lebih liberal dan disiplin fiskal yang ketat.

Langkah-langkah makroekonomi yang paling menentukan adalah:

1. Independensi Kebijakan Moneter: Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang memberikan status independen kepada Bank Indonesia (BI), menjadikannya bertanggung jawab untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai tukar Rupiah dan mengendalikan laju inflasi. Ini merupakan penolakan langsung terhadap peran BI pada masa Orde Baru yang berfungsi sebagai alat penutup defisit pemerintah.

Kebijakan Moneter Kontraktif: Penerapan kebijakan uang ketat, termasuk kenaikan substansial suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI)—yang mencapai puncaknya di sekitar 70,44% pada kuartal ketiga 1998—berhasil mengendalikan jumlah uang beredar dan meredam laju inflasi yang pada tahun 1998 mencapai 77,6%. Upaya ini membawa hasil dengan penurunan inflasi tahunan menjadi 2,01% pada tahun 1999.

Konklusi Akhir: Stabilitas Makro Vs. Kedaulatan Ekonomi

Meskipun Era Reformasi berhasil menstabilkan makroekonomi (melalui independensi BI dan disiplin fiskal), kajian ini menemukan bahwa pemulihan ini dihadapkan pada dilema baru: liberalisasi yang didikte pasar, meskipun membawa efisiensi dan stabilitas moneter, berisiko memperlebar ketimpangan jika tidak diimbangi oleh keadilan sosial.

Dari perspektif kritis, perubahan sistem menuju pasar terbuka (liberalisasi) pasca-krisis justru memberikan peluang bagi kelanjutan praktik rent-seeking dan dominasi oligarki ekonomi lama yang berhasil beradaptasi dengan kerangka politik baru yang lebih demokratis. Penekanan pada "efisiensi" di dalam konstitusi, meskipun secara teoritis baik, dapat bertentangan dengan prinsip "keadilan" yang fundamental bagi ekonomi kerakyatan, misalnya dalam hal penyediaan harga kebutuhan pokok yang seragam antarwilayah.

Secara ringkas, transisi ekonomi Indonesia dari Orde Baru ke Reformasi adalah kemenangan kebijakan makroekonomi pragmatis yang mampu membalikkan krisis moneter menjadi stabilitas, namun meninggalkan pekerjaan rumah yang belum selesai: bagaimana menyeimbangkan efisiensi pasar global yang diperlukan dengan tuntutan keadilan sosial dan penguatan ekonomi kerakyatan, untuk membongkar warisan kelembagaan negatif (KKN dan ketimpangan struktural) yang ditinggalkan oleh rezim yang tumbang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolph, R. (2016). *Perkembangan Sistem Ekonomi Pada Masa Orde Baru (Rezim Aoeharto) Terhadap Sektor Perekonomia Indonesia*. 04(01), 1–23.
- Country, I., & Guide, C. (2018). *Indonesia - Banking*. 5, 21–23.
- Ekhsan, M., Kom, S., & Pengantar, K. (2020). *PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO INDONESIA DI ERA REFORMASI Mata Kuliah Pengantar Aplikasi Komputer Dosen Pengampu : PROGRAM STUDI MANAJEMEN UNIVERSITAS PELITA BANGSA BEKASI 2020*. 111910253.
- Fachrunnisa, L. K., Armiyati, L., & Jayusman, I. (2004). Strategi Pemerintah Indonesia Mengatasi Masalah Ekonomi pada Masa Reformasi. *Journal of Sciences & Humanities "ESTORIA,"* 493–513.
- Khairunnisa, E., Maisyaroh, D., & Putri, K. T. (2023). Analisis Kebijakan Moneter Terhadap Krisis Moneter 1997-1998 Di Indonesia. *JEI : Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.56184/jeijournal.v1i2.317>
- Lestari, D. A. (2013). Perekonomian Indonesia Makalah Perekonomian Indonesia. *Www.Academia.Edu*, March, 1–17. https://www.academia.edu/6776981/PEREKONOMIAN_INDONESIA MAKALAH PER EKONOMIAN INDONESIA Disusun Oleh
- Mawar Az-Zahra, C., Angraini, H., Ananta, R., Noviarita, H., Syariah, E., Dan Bisnis Islam, E., & Raden Intan Lampung, U. (2024). JICN: Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara SEJARAH PEREKONOMIAN INDONESIA PASCA KRISIS EKONOMI PADA MASA REFORMASI HISTORY OF INDONESIAN ECONOMY POST ECONOMIC CRISIS DURING THE REFORMATION PERIOD. *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 1(6), 10189–10192. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>
- Susanto, D., & Amiruddin. (2025). Perkembangan Sistem Ekonomi di Indonesia. *Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, 11(1), 72–79. <https://doi.org/10.37567/shar-e.v1i1.3932>
- Yauma tertibi, Y. T. (2021). Perbandingan Konstitusi Ekonomi Indonesia Sebelum Reformasi Dan Pasca Reformasi. *SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies*, 1(3), 122–132. <https://doi.org/10.28926/sinda.v1i3.969>
- Zulkarnain, M. E. (2016). Peran dan Kebijakan Zaman Orde Baru Dalam Sektor Ekonomi Indonesia. *IAIN Tulungagung*, 4(1), 38–39.

- Denny, Charlotte. "Suharto, Marcos and Mobutu Head Corruption Table with \$50bn Scams."* *The Guardian*, 26 Mar. 2004, <https://www.theguardian.com/world/2004/mar/26/indonesia.philippines>. Accessed 20 Dec. 2025.
- "Rencana Pembangunan Lima Tahun." Wikipedia Bahasa Indonesia, 26 Nov. 2025, id.wikipedia.org/wiki/Rencana_Pembangunan_Lima_Tahun. Accessed 20 Dec. 2025.
- Damanhuri, Didin S. "Reformasi Sistem Keuangan." Republika, 9 Sep. 2020, <https://www.republika.id/posts/10054/reformasi-sistem-keuangan>. Accessed 20 Dec. 2025.
- "Reformasi 20 Tahun dan Struktur Ekonomi Indonesia." Bagian Perekonomian dan Pembangunan, Pemerintah Kabupaten Buleleng, 28 Jan. 2019, <https://ekbangsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/reformasi-20-tahun-dan-struktur-ekonomi-indonesia-42>. Accessed 20 Dec. 2025.
- "Program Unggulan Orde Baru untuk Ekonomi Nasional." Media Indonesia, 27 Apr. 2025, <https://mediaindonesia.com/humaniora/764823/program-unggulan-orde-baru-untuk-ekonomi-nasional>. Accessed 20 Dec. 2025.
- "Krisis Moneter 1997 di Indonesia #LectureNotes." Finance BINUS, 3 Des. 2022, finance.binus.ac.id/2022/12/krisis-moneter-1997-di-indonesia-lecturenotes/. Accessed 20 Dec. 2025.
- "Jejak Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dari Masa ke Masa." JEO Kompas.com, 26 Nov. 2018, <https://joe.kompas.com/jejak-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-dari-masa-ke-masa>. Accessed 20 Dec. 2025.
- "Indonesian Political Economy: A Historical Analysis." The Rest: Journal of Politics and Development, 22 Mar. 2019, <https://therestjournal.com/2019/03/22/477/>. Accessed 20 Dec. 2025.
- Indonesia Investments. "New Order Miracle of Suharto's Indonesia." Indonesia Investments, 2025, <https://www.indonesia-investments.com/culture/economy/new-order-miracle/item247>. Accessed 20 Dec. 2025.
- Paper Prepared in the Department of State for the National Security Council. "Foreign Relations of the United States, 1964–1968, Volume XXVI, Indonesia; Malaysia-Singapore; Philippines: Document 241."* Edited by Edward C. Keefer, U.S. Department of State, 4 Aug. 1967, history.state.gov/historicaldocuments/frus1964-68v26/d241.
- 6 Kebijakan Ekonomi Orde Baru dan Dampaknya bagi Indonesia. (2023, December 24). Kumparan NEWS. <https://kumparan.com/sejarah-dan-sosial/6-kebijakan-ekonomi-orde-baru-dan-dampaknya-bagi-indonesia-21pV4ss1YL6/full>
- Touwen, Jeroen. "The Economic History of Indonesia". EH.Net Encyclopedia, edited by Robert Whaples. March 16, 2008. URL <https://eh.net/encyclopedia/the-economic-history-of-indonesia/>